

**PENGAWASAN BEA CUKAI KANTOR PELAYANAN
UTAMA BATAM DALAM PEREDARAN BARANG
ELEKTRONIK ILEGAL**

SKRIPSI



Oleh:

Melati Sinta Klaronika. S

191010005

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL HUMANIORA

UNIVERSITAS PUTERA BATAM

TAHUN 2023

**PENGAWASAN BEA CUKAI KANTOR PELAYANAN
UTAMA BATAM DALAM PEREDARAN BARANG
ELEKTRONIK ILEGAL**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana



Oleh:

Melati Sinta Klaronika. S

191010005

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL HUMANIORA

UNIVERSITAS PUTERA BATAM

TAHUN 2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Melati Sinta Klaronika. S

NPM : 191010005

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PENGAWASAN BEA CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BATAM
DALAM PEREDARAN BARANG ELEKTRONIK ILEGAL“

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2023



Melati Sinta Klaronika S

191010005

**PENGAWASAN BEA CUKAI KANTOR PELAYANAN
UTAMA BATAM DALAM PEREDARAN BARANG
ELEKTRONIK ILEGAL**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

Melati Sinta Klaronika. S

191010005

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 28 Juli 2023



Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP.,M.AP

Pembimbing



ABSTRAK

Pengawasan Bea Cukai merupakan elemen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan peredaran barang internasional. Salah satu sektor perdagangan yang menjadi sorotan adalah peredaran barang elektronik ilegal di kota Batam. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam dalam peredaran barang elektronik ilegal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah petugas Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam, Pebisnis barang elektronik, dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah menetapkan unit pengawasan yang terdiri dari Bidang Penindakan dan Penyidikan. Standar operasional prosedur yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas telah diterapkan oleh Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam. Pengawasan yang dilakukan Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam mencakup periode yang panjang karena dilakukan secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperketat pengawasan dengan cara memberikan pelatihan pendukung kepada petugas serta memanfaatkan perkembangan teknologi.

Kata kunci: Pengawasan, Bea Cukai, Ilegal.

ABSTRACT

Customs control is an important element in maintaining order and security in the international circulation of goods. One of the trade sectors that is in the spotlight is the circulation of illegal electronic goods in Batam City. This thesis aims to describe and analyze Customs and Excise supervision at the Batam City Main Service Office in the distribution of illegal electronic goods. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection through interviews and documentation studies. The informants in this study were Customs and Excise officers at the Batam Main Service Office, electronic goods business actors, and the public. The result of this research is the formation of a supervisory unit consisting of the Enforcement and Investigation Division. The standard operating procedure used is the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 41 of 2021 concerning the Implementation of Free Trade Areas and Free Ports (KPBPB) which refers to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 34/PMK .04/2021 of 2021 concerning the Entry and Release of Goods to and From the Free Trade Zone and Free Harbor. Utilization of Human Resources (HR) and facilities has been carried out by the Batam Customs Main Service Office. Supervision carried out by Customs and Excise at the Batam Main Service Office covers a long period of time because it is carried out continuously for a long period of time. Several attempts were made to tighten supervision by providing supporting training to officers and utilizing technological developments.

Keywords: *Supervision, Customs, Illegal.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena telah memberikan segala kesempatan, kesehatan dan kemudahan dalam penulisan skripsi yang merupakan bagian dari syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elvi Husda, S.Kom., M.Si;
2. Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom;
3. Ketua Program Studi Administrasi Negara Ibu Lubna Salsabila, S.IP.,M.IP.M.P.A ;
4. Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
5. Bapak Timbol Dompok Sibarani , S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP., Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si , Ibu Lubna Salsabila, S.IP., M.IP., M.PA, Ibu Etika Khairina, S.Sos., M.I.P selaku Dosen Program Studi Administrasi Negara;

7. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
8. Seluruh Anggota dan Staff Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam yang sudah mengizinkan dan bersedia membantu dalam menyelesaikan penelitian;
9. Kepada kedua orang tua tercinta, dan saudara/i yang sudah memberi semangat, kasih sayang dan doa tulus kepada peneliti;
10. Kepada Julius Arnaldo sebagai partner yang menemani dalam proses wawancara dan pengambilan data;
11. Kepada Yulia Anisa, Eva Lesna, Meysi Ansari, Betty Krisdayanti dan teman-teman tercinta pada Program Studi Administrasi Negara angkatan tahun2019;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan cahaya kebaikan dan kesehatan bagi kita semua, Aamiin.

Batam, 28 Juli 2023

Melati Sinta Klaronika S

191010005



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I :PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.6 Manfaat Peneliltian	7
1.6.1 Manfaat Teoritis	7
1.6.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II :TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Teori Pengawasan.....	8
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	8
2.1.2 Fungsi Pengawasan.....	10
2.1.3 Jenis Pengawasan	10
2.1.4 Metode Pengawasan	12
2.1.6 Prosedur Pengawasan	15
2.1.7 Indikator Pengawasan	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran	22
BAB III :METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Penelitian	23

3.2 Sifat Penelitian	24
3.3 Lokasi dan Periode Penelitian	24
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	24
3.3.2 Periode Penelitian	25
3.4 Sumber Data.....	25
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.6 Metode Analisis Data	29
3.7 Keabsahan Data	31
BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Gambaran Umum Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam.....	33
4.1.2 Pengawasan Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam Dalam Peredaran Barang Elektronik Ilegal.....	50
4.2 Pembahasan.....	79
4.2.1 Pengawasan Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam Dalam Peredaran Barang Elektronik Ilegal.....	79
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 3.1 Metode Analisis Data	31
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam ...	49
Gambar 4. 2 Kerjasama Bea Cukai dengan Singapore	55
Gambar 4. 3 Kerjasama Bea Cukai dengan Instansi lain	55
Gambar 4. 4 Perencanaan Pengawasan Bea Cukai	61
Gambar 4. 5 Kerjasama Bea Cukai Batam dengan Instansi Lain	62
Gambar 4. 6 Pemeriksaan Barang Menggunakan X-ray	63
Gambar 4. 7 Pemeriksaan Barang dan Dokumen	63
Gambar 4. 8 Penindakan Barang Eletronik Ilegal.....	68
Gambar 4. 9 Laporan Audit Pengawasan Bea Cukai	69
Gambar 4. 10 Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai KPU Batam.....	73
Gambar 4. 11 Kapal Patroli Bea Cukai	73
Gambar 4. 12 Mesin X-ray	74
Gambar 4. 13 Anjing Pelacak	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Barang Hasil Penindakan Bea Cukai Batam	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian	25
Tabel 3. 3 Kriteria Informan	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan merupakan proses atau aktivitas yang melibatkan pemantauan, penilaian, dan pengendalian terhadap suatu kegiatan, proses, atau keputusan. Pengawasan merupakan suatu proses yang penting dilakukan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, kepatuhan, dan pencapaian tujuan dalam suatu organisasi atau sistem. Pengawasan adalah tindakan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, dan prinsip yang telah ditetapkan (Herdiana, 2020). Pengawasan juga dilakukan dalam sistem pemerintahan Indonesia di berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengawasan pemerintah merupakan proses di mana pemerintah memantau dan mengawasi kegiatan serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi, individu, atau masyarakat. Tujuannya untuk menjagaketertiban, keamanan, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan negara. Pengawasan pemerintah dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pembuatan dan penegakan peraturan, inspeksi, audit, investigasi, serta pengumpulan dan analisis data (Toding, 2016). Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan menjamin keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Salah satu contohnya adalah pengawasan yang dilakukan

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertanggung jawab dalam bidang kepabeanan dan cukai.

Pemerintah memahami pentingnya pengawasan dan pengaturan dalam perdagangan internasional guna mengendalikan arus barang yang masuk dan keluar negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan bahwa barang impor dan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pemenuhan standar keamanan, kesehatan, dan standarisasi lainnya. Melalui pengawasan yang ketat dan tata kerja yang terorganisir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan dalam mendorong kemudahan perdagangan, melindungi masyarakat dari barang ilegal atau berbahaya, serta memastikan penerimaan negara yang optimal dalam bidang kepabeanan dan cukai. Dengan adanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemerintah memiliki entitas yang khusus menangani masalah kepabeanan dan cukai, serta dapat menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi yang diperlukan untuk menjaga kepentingan nasional, melindungi masyarakat, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Kota Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Penetapan Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ) menjadikan salah satu kawasan pabeanan strategis bagi Indonesia. Kawasan pabeanan merupakan wilayah dengan batas-batas yang ditetapkan di pelabuhan laut, bandara, atau tempat lainnya yang berfungsi sebagai

tempat untuk mengawasi lalu lintas barang di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Iman et al., 2020). Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran barang elektronik ilegal di wilayahnya. Batam merupakan daerah strategis dalam perdagangan internasional dan sebagai kawasan perdagangan bebas menjadi faktor peningkatan risiko peredaran barang elektronik ilegal . Pengawasan yang efektif dari Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam terhadap peredaran barang elektronik ilegal sangat penting untuk melindungi kepentingan negara, melawan perdagangan ilegal, menjaga persaingan yang sehat, dan melindungi konsumen dari produk elektronik yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan.

Kasus penyelundupan barang elektronik secara ilegal di Kota Batam masih sering terjadi. Penyelundupan adalah kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang secara gelap dan ilegal untuk menghindari bea masuk atau bea keluar yang merugikan negara. Penyelundupan barang elektronik di Kota Batam dipicu oleh permintaan pasar di luar Batam yang menginginkan barang elektronik dengan harga relatif lebih murah daripada daerah lain. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa barang elektronik adalah barang pabean yang tidak dikenakan pajak ketika memasuki kawasan Batam, sehingga harganya menjadi lebih murah (Maher, 2016).

Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam terus melakukan berbagai upaya untuk mengawasi peredaran barang elektronik ilegal. Bea Cukai Batam berhasil menangkap barang-barang hasil dari pengawasan yang dilakukan baik melalui pelabuhan dan bandar udara kemudian dikumpulkan. Dalam melakukan

penyidikan terhadap barang hasil penindakan, Bea Cukai secara rutin memusnahkan barang jika dianggap berpotensi untuk disalahgunakan, dan memberikan pengecualian jika dapat bermanfaat bagi kemanusiaan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bea Cukai dalam pengawasan terhadap peredaran barang elektronik ilegal, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan melindungi pendapatan negara.

Tabel 1. 1 Barang Hasil Penindakan Bea Cukai Batam

Barang Hasil Tangkapan Penindakan Bea Cukai Kota Batam		
Periode 2016 – 2022		
No	Keterangan	Jumlah
1	Barang elektronik	1.024 buah
2	Barang electronic campuran	44 koli
3	Obat-obatan	360 tablet
4	Sextoys	8 buah
Total hasil penindakan		118 penindakan
Total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan		Rp. 720.378.518,-
Total kerugian negara		Rp. 154.020.905,-

(Sumber: Sitanggang, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas barang hasil tangkapan dari 118 penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai di kota Batam dalam kurun waktu sekitar 6 tahun (2016- 2022), ditemukan beberapa barang ilegal yang terdiri dari 4 jenis barang. Untuk barang dengan urutan jumlah dari paling sedikit yaitu sextoys kemudian

barang elektronik campuran, diikuti oleh obat-obatan dan untuk persentase tertinggi berada pada barang elektronik. Barang elektronik tersebut terdiri dari televisi, monitor, laptop, CPU dengan total 1.024. Adapun perkiraan barang yang akan dimusnahkan senilai Rp. 720.378.518,- dengan total kerugian negara mencapai Rp. 154.020.905,-. Berdasarkan peraturan yang dimuat dalam pasal 33 Keputusan Menteri Keuangan nomor 178 tahun 2019, barang-barang tersebut masuk kedalam kategori Barang Milik Negara (BMN) dan akan dimusnahkan apabila barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, tidak dapat dialihkan, tidak memiliki nilai ekonomis dan dilarang untuk ekspor ataupun impor. Untuk barang yang masih dapat dipergunakan lagi akan di proses berdasarkan peraturan yang mengaturnya. Ini merupakan salah satu tugas dari Bea Cukai dalam menjalankan pengawasan terhadap barang ilegal yang tidak memenuhi standar persyaratan yang berlaku.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Iman dkk, pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik oleh Bea dan Cukai Kota Batam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik yang dilakukan oleh bea cukai kota Batam dan hambatan yang dihadapi Bea Cukai dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai kota Batam belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih adanya tindak penyelundupan yang terjadi di Kota Batam yaitu masih banyaknya penyebaran pelabuhan ilegal di kota Batam sehingga menyulitkan dalam menentukan pemusatan pengawasan strategis

serta masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana operasi yang memperlambat gerak kerja dari pihak bea cukai Batam

Berdasarkan tupoksi Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai pengawas yang dilakukan terhadap barang elektronik ilegal dan data yang diperoleh yang telah dipaparkan diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam Dalam Peredaran Barang Elektronik Ilegal”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah penelitian terkait pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai KPU Batam dalam peredaran barang elektronik ilegal periode 2016-2022.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian diatas, peneliti secara sadar memiliki keterbatasan dalam ruang dan kemampuan berpikir sehingga peneliti melakukan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus kepada pengawasan yang dilakukan Bea Cukai KPU Batam dalam menangani peredaran barang elektronik ilegal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengawasan Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam dalam peredaran barang elektronik ilegal?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan oleh Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam dalam peredaran barang elektronik ilegal.

1.6 Manfaat Peneliltian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan administrasi publik khususnya dalam mata kuliah Birokrasi

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bea Cukai KPU Batam: Memberikan masukan dan saran kepada Bea Cukai KPU Batam terkait pelaksanaan pengawasan dalam peredaran barang elektronik ilegal.
2. Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya.
3. Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan kepada masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan sesuatu yang penting bagi setiap organisasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang diinginkan, sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Menurut Handoko, pengawasan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Wicaksana & Rachman, 2018). Pengawasan ini dilakukan dengan pendekatan sistematis yang mencakup beberapa langkah, seperti menetapkan standar pelaksanaan berdasarkan perencanaan, merancang sistem informasi untuk umpan balik, membandingkan kegiatan yang sebenarnya dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menilai dan mengukur penyimpangan- penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan agar semua sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan (Iman et al., 2020).

Menurut Siagian, pengawasan dapat diartikan sebagai tindakan mengamati dan memantau melalui berbagai metode, seperti mengawasi secara langsung kegiatan operasional di lapangan, membaca laporan, dan menggunakan cara lainnya, ketika kegiatan operasional sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk

mengetahui apakah terdapat penyimpangan yang disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugianto et al., 2019). Hal serupa juga diungkapkan Fahmi bahwa secara umum, pengawasan dapat didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, serta secara lebih luas mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan menurut Daulay (2019), pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi dengan tujuan memastikan bahwa semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan mencakup segala upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai fakta sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengawasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pihak yang berwenang untuk memantau, mengamati, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan atau tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan melibatkan pemantauan terhadap berbagai aspek, seperti kinerja individu atau tim, penggunaan sumber daya, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, pengendalian kualitas, dan pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan berperan penting dalam mengidentifikasi masalah, mengoreksi kesalahan, mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta menjaga

akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi (Coker et al., 2018). Dengan melakukan pengawasan secara teratur dan terencana, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja mereka, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan dari pihak internal maupun eksternal.

2.1.2 Fungsi Pengawasan

Menurut Siagian pengawasan memiliki beberapa fungsi penting dalam penerapannya. Berikut penjelasan mengenai fungsi penting pengawasan:

1. Pengawasan memberikan informasi penting kepada manajemen mengenai kondisi aktual di mana organisasi beroperasi.
2. Melalui pengawasan, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam melaksanakan rencana dapat diidentifikasi dengan lebih efisien dan efektif.
3. Pengawasan membantu memahami berbagai faktor yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional.
4. Dengan adanya pengawasan, manajemen dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu segera diambil untuk mengakui dan mengapresiasi kinerja yang memuaskan.

2.1.3 Jenis Pengawasan

Dalam penerapannya pengawasan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempermudah cara kerjanya. Menurut Handoko Pengawasan dibagi menjadi tiga jenis yaitu feedforward control, concurrent control, dan feedback control (Poetra, 2019). Berikut adalah penjelasannya:

1. *Feedforward Control* (Pengawasan Praaksi)

Feedforward control adalah jenis pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan atau proses dimulai. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan mencegah masalah atau penyimpangan sebelum terjadi. Dalam feedforward control, fokus diberikan pada perencanaan dan pengaturan awal untuk memastikan bahwa semua persyaratan, sumber daya, dan prosedur yang diperlukan tersedia dan terpenuhi sebelum kegiatan dimulai. Contohnya, dalam konteks produksi, feedforward control dapat melibatkan pemeriksaan bahan baku sebelum digunakan, pelatihan karyawan sebelum melaksanakan tugas, atau peninjauan rencana proyek sebelum dimulai

2. *Concurrent Control* (Pengawasan Bersamaan)

Concurrent control adalah jenis pengawasan yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan atau proses. Tujuannya adalah untuk memonitor kinerja dan aktivitas saat ini untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar dan target yang telah ditetapkan. Pengawasan bersamaan melibatkan pemantauan langsung, komunikasi secara teratur, dan pengukuran kinerja secara real-time. Manajer atau pengawas mengambil tindakan segera jika ada penyimpangan dari standar yang ditetapkan. Contohnya, pengawasan bersamaan dapat dilakukan melalui rapat progres proyek, pengamatan langsung, atau melalui sistem pemantauan yang terintegrasi.

3. *Feedback Control* (Pengawasan Umpan Balik):

Feedback control adalah jenis pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan atau proses selesai. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja dan hasil

yang telah dicapai, serta mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan umpan balik yang diterima. Pengawasan umpan balik melibatkan analisis kinerja, perbandingan dengan standar yang telah ditetapkan, dan pengambilan langkah-langkah untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja di masa depan. Contohnya, feedback control dapat melibatkan evaluasi kinerja karyawan setelah penyelesaian proyek, survei kepuasan pelanggan, atau analisis data keuangan setelah periode akuntansi tertentu.

2.1.4 Metode Pengawasan

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengawasan. Menurut Handoko (2019) pemilihan metode pengawasan yang tepat tergantung pada sifat kegiatan yang diawasi, tujuan pengawasan, serta ketersediaan sumber daya yang ada. Berikut ini adalah beberapa metode pengawasan yang umum digunakan:

1. Pengawasan Langsung (*Direct Supervision*)

Metode ini melibatkan pengawas yang secara langsung hadir di tempat kegiatan berlangsung untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas. Pengawas dapat memberikan arahan, umpan balik, serta melakukan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas yang dilakukan (Yeni & Malau, 2021).

2. Pengawasan Tidak Langsung (*Indirect Supervision*):

Metode ini dilakukan tanpa adanya interaksi langsung antara pengawas dan pelaksana kegiatan. Pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui

laporan tertulis, penggunaan teknologi, atau mekanisme pengawasan lainnya. Contohnya adalah dengan menerima laporan rutin, memeriksa dokumen, atau menggunakan alat pengawasan elektronik (Sugianto et al., 2019).

3. Pengawasan Melalui Pemeriksaan (*Inspection*):

Metode ini melibatkan pemeriksaan fisik atau penilaian langsung terhadap kegiatan atau fasilitas yang diawasi. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan memeriksa kualitas produk, melihat kondisi fisik, atau mengevaluasi kepatuhan terhadap standar atau prosedur yang ditetapkan.

2.1.5 Pengawasan yang efektif

Pengawasan yang efektif memiliki beberapa karakteristik penting yang dapat membantu memastikan keberhasilannya dalam mencapai tujuan organisasi (Sugiono, 2019). Berikut ini adalah beberapa karakteristik pengawasan yang efektif:

1. Terarah pada Tujuan

Pengawasan yang efektif harus terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Hal ini berarti pengawasan harus fokus pada memastikan bahwa kegiatan yang diawasi sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan harus mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

2. Terencana dan Terstruktur:

Pengawasan yang efektif harus direncanakan dengan baik dan memiliki struktur yang jelas. Ini termasuk menetapkan standar dan metode pengawasan yang jelas, mengatur jadwal dan frekuensi pengawasan, serta menentukan peran dan tanggung jawab pengawas. Pengawasan yang terencana dan terstruktur memungkinkan adanya pendekatan sistematis dan konsisten dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan.

3. Komunikasi yang Efektif:

Komunikasi yang baik antara pengawas dan pelaksana kegiatan sangat penting dalam pengawasan yang efektif. Pengawas harus dapat mengomunikasikan harapan, standar, dan umpan balik secara jelas kepada pelaksana kegiatan. Di sisi lain, pelaksana kegiatan juga perlu memiliki mekanisme untuk melaporkan kemajuan, kendala, dan masalah yang mereka hadapi kepada pengawas. Komunikasi yang efektif membantu membangun pemahaman yang saling mendukung dan memastikan adanya koordinasi yang baik dalam pengawasan.

4. Objektif dan Adil:

Pengawasan yang efektif harus objektif dan adil. Ini berarti pengawas harus dapat melakukan penilaian yang obyektif berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa dipengaruhi oleh preferensi pribadi atau bias. Pengawas juga harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang diawasi, tanpa memihak atau membedakan pihak-pihak tertentu.

5. Responsif dan Proaktif:

Pengawasan yang efektif harus responsif terhadap perubahan dan tantangan yang terjadi dalam kegiatan. Pengawas harus dapat merespons dengan cepat terhadap masalah atau ketidaksesuaian yang ditemukan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Selain itu, pengawasan yang efektif juga harus proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah atau risiko sebelum terjadi, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.

6. Mengedepankan Pembelajaran dan Perbaikan:

Pengawasan yang efektif harus melibatkan siklus pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Pengawas harus dapat mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya, mengevaluasi efektivitas metode pengawasan yang digunakan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Proses ini membantu membangun kapasitas organisasi dalam meningkatkan kualitas dan kinerja kegiatan secara berkelanjutan. Dengan memiliki karakteristik-karakteristik ini, pengawasan dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.6 Prosedur Pengawasan

Prosedur pengawasan merujuk pada langkah-langkah sistematis yang diikuti dalam melaksanakan pengawasan. Prosedur ini membantu memastikan bahwa pengawasan dilakukan dengan konsisten dan efektif. Meskipun prosedur pengawasan dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi dan kegiatan yang

diawasi, berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diikuti dalam prosedur pengawasan:

1. Menetapkan Standar

Langkah pertama dalam prosedur pengawasan adalah menetapkan standar atau kriteria yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengawasi kegiatan. Standar ini harus jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Standar tersebut dapat mencakup kualitas, waktu, kuantitas, kepatuhan terhadap kebijakan atau regulasi, dan lain sebagainya.

2. Perencanaan Pengawasan

Setelah standar ditetapkan, langkah berikutnya adalah merencanakan pengawasan. Dalam tahap ini, ditentukan waktu, frekuensi, dan metode pengawasan yang akan digunakan. Hal ini melibatkan pengaturan jadwal pengawasan, alokasi sumber daya, serta identifikasi aspek atau area yang perlu diawasi dengan lebih cermat.

3. Pelaksanaan Pengawasan:

Pada tahap ini, pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pengumpulan informasi terkait pelaksanaan kegiatan. Metode pengawasan yang telah ditentukan, seperti pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pemeriksaan fisik, atau penggunaan teknologi, diterapkan dalam proses ini.

4. Evaluasi Hasil:

Setelah pelaksanaan pengawasan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi hasil yang diperoleh. Hasil pengawasan dibandingkan dengan standar yang

telah ditetapkan untuk menentukan apakah ada ketidaksesuaian atau masalah yang perlu ditindaklanjuti. Evaluasi dapat melibatkan analisis data, pembuatan laporan pengawasan, dan identifikasi tindakan perbaikan atau perubahan yang diperlukan.

5. Tindak Lanjut:

Tahap terakhir dalam prosedur pengawasan adalah melakukan tindak lanjut terhadap temuan atau masalah yang ditemukan selama pengawasan. Tindakan perbaikan, pemberian sanksi, pelatihan tambahan, atau perubahan prosedur adalah beberapa contoh tindakan yang dapat diambil sebagai respons terhadap hasil pengawasan. Penting untuk memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang berlaku.

2.1.7 Indikator Pengawasan

Dalam teori pengawasan, indikator merupakan alat atau petunjuk yang digunakan untuk mengukur atau menilai kinerja atau hasil dari aktivitas yang sedang diawasi. Indikator ini membantu dalam memantau dan mengevaluasi apakah pelaksanaan pengawasan telah mencapai tujuan yang diharapkan atau sejauh mana keberhasilan pengawasan tersebut. Menurut Handoko (Oktarianda & Rusli, 2023) dalam teori pengawasan terdapat beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksana Pengawasan

Indikator dalam hal ini mengacu pada kemampuan, kompetensi, dan integritas pelaku atau pelaksana pengawasan. Indikator ini dapat mencakup aspek

seperti tingkat kepatuhan terhadap kode etik, tingkat pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab pengawasan, serta efektivitas dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

2. Standar Operasional Prosedur Pengawasan

Indikator ini berfokus pada pemahaman dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk melakukan pengawasan. Indikator ini membantu memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Daya dan peralatan

Indikator ini mencerminkan ketersediaan dan kualitas sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pengawasan. SDM (Sumber Daya Manusia) meliputi personel yang terlibat dalam pengawasan, dan sarana, prasarana yang mencakup fasilitas dan peralatan yang mendukung aktivitas dalam kegiatan pengawasan.

4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Indikator ini berfokus pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas pengawasan. Pemantauan terhadap waktu pelaksanaan ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara tepat waktu dan tidak terlambat dan kapan saja kegiatan pengawasan tersebut dilakukan.

5. Tindakan korektif

Indikator pengawasan adalah alat atau parameter yang digunakan untuk mengukur atau menilai efektivitas dari tindakan pengawasan yang dilakukan. Indikator pengawasan membantu dalam menentukan sejauh mana tujuan

pengawasan telah tercapai dan memberikan informasi penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan yang ada. Tindakan korektif merupakan salah satu jenis indikator pengawasan yang mengacu pada langkah-langkah perbaikan atau tindakan perbaikan yang diambil setelah terdeteksinya pelanggaran atau kelemahan dalam proses pengawasan serta bertujuan untuk mengatasi dan mengoreksi masalah tersebut agar tidak terulang di masa mendatang

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Afifah Agusma Yeni, (2021)	Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Terhadap Wali Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai	Deskriptif Kualitatif	Pengawasan yang dilakukan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari Muara Sakai BAMUS belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu komunikasi yang kurang baik, ketidak sinkronan tindakan di beberapa kegiatan, kurangnya gagasan BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasan, serta kurangnya transparansi.
2.	Febi Rizki Heriyana, Neneg Weti Isnawaty, Yogi Suprayogi Sugandi (2021)	Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel bersumber dari Rumah Kos di Kecamatan Coblang kota Bandung oleh	Metode Kualitatif	Pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung kurang baik. Penyebabnya adalah

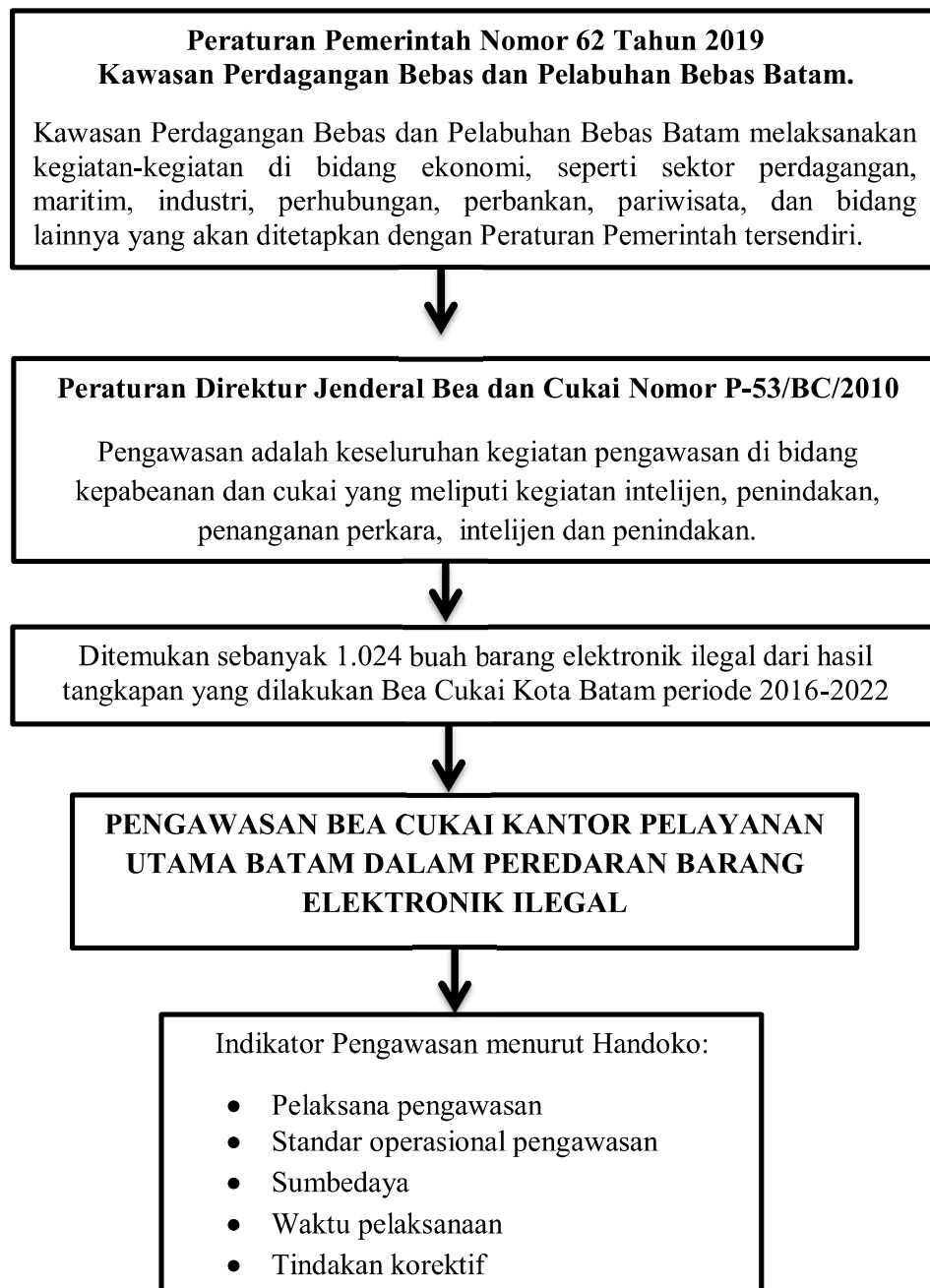
		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kota Bandung		keterbatasan data base potensi rumah kos di Kota Bandung dan prosedur pada tahap pengawasan belum berjalan maksimal, serta sanksi berupa teguran yang diberikan kepada pelanggar wajib pajak rumah kos di Kota Bandung belum menyeluruh.
3.	Indah Oktarianda, Zaili Rusli (2023)	Pengawasan Penerapan Smart Card Blue oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV di Kota Pekanbaru	Metode Kualitatif	Pengawasan penerapan smart card BLUE oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini terlihat dari hasil penelitian berdasarkan empat indikator pengawasan yaitu pelaku pengawasan kebijakan, standar operasional prosedur pengawasan, sumber daya keuangan dan peralatan pengawasan, serta jadwal pelaksanaan pengawasan.
4.	Badrudin Kurniawan (2019)	Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya	Metode Kualitatif	Penerapan pengawasan tidak berjalan dengan lancar, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi seperti kurangnya jumlah dan kemampuan pengawas, keterbatasan sarana pemeriksaan, minimnya pengetahuan masyarakat, banyaknya pengelola limbah B3 yang tidak berizin, dan jenis instrumen kebijakan Command and Control memiliki kelemahan-kelemahan.
5.	Dian Herdiana (2020)	Pengawasan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Kebijakan	Metode Kualitatif	Upaya pengawasan belum dilakukan secara kolaboratif terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan sosial dalam

		Bantuan Sosial Terdampak Covid-19		<p>rangka perlindungan masyarakat terdampak COVID-19. Dalam hal ini diperlukan upaya rekonstruksi model pengawasan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang memungkinkan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan bidang pengawasan guna menghasilkan sistem pengawasan yang integratif dan sinergis.</p>
6.	<p>Anggun Nurul Iman, Helmi, Mahdi Syahbadir (2020)</p>	<p>Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik oleh Bea dan Cukai Kota Batam</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Batam sejauh ini belum berjalan dengan efektif, hal ini dilihat dari masih adanya tindak penyelundupan yang terjadi di Kota Batam. Dimana hal ini disebabkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak bea cukai Batam, yaitu masih banyaknya penyebaran pelabuhan ilegal di kota Batam sehingga menyulitkan pihak bea cukai dalam menentukan pemusatan pengawasan strategis serta masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana operasi yang memperlambat gerak kerja dari pihak bea cukai Batam.</p>
7.	<p>Hasim Hartono (2021)</p>	<p>Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang Bebas KKN dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang</p>

				pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses.
--	--	--	--	--

(Sumber : Peneliti, 2023)

2.3 Kerangka Pemikiran



(Sumber: Peneliti, 2023)

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam dengan menggali makna dan interpretasi subjektif dari perspektif individu yang terlibat. Hubungan penelitian yang dilakukan dengan penelitian kualitatif sangat relevan karena sistematis sehingga mampu untuk mengolah menganalisis dan mendeskripsikan secara jelas dan terstruktur terkait penelitian sosial, hasilnya mampu untuk memberikan temuan yang konkrit. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman, keyakinan, nilai, dan konteks sosial yang melibatkan partisipan dalam penelitian. Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang pengalaman manusia dan kompleksitasnya. Ia menekankan pentingnya memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah yang mempengaruhi fenomena yang diteliti (Eni, 2019). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengawasan Bea Cukai KPU Batam terhadap peredaran barang elektronik ilegal.

3.2 Sifat Penelitian

Menurut Muh Fitrah (2018), penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada yang terjadi pada masa kini dan masa lalu (Fitrah, 2018). Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis, terperinci, dan obyektif tentang suatu fenomena, situasi, atau populasi yang ada. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang menggambarkan karakteristik, atribut, atau kejadian yang ada, tanpa melakukan manipulasi variabel atau menguji hipotesis tertentu. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif. Peneliti menggunakan penelitian lapangan langsung untuk mempelajari dan mengumpulkan data Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama (KPU) Batam. Penelitian deskriptif dapat melibatkan pengumpulan data melalui berbagai metode, seperti wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen. Hasil data tersebut menjadi data primer dan sekunder, dan data tersebut akan digunakan untuk mendukung penelitian ini. Buku, jurnal, penelitian sebelumnya, artikel, dan data lainnya yang dikumpulkan sesuai dengan judul penelitian sebagai sumber informasi tambahan

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai kota Batam yang beralamat di Jl. Kuda Laut, Sungai Jodoh. Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29432.

3.3.2 Periode Penelitian

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan																
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus											
		2023	2023	2023	2023	2023	2023											
1.	Studi Pustaka	■	■	■														
2.	Penyusunan Proposal		■	■														
3.	Pengumpulan Data			■	■	■												
4.	Pengolahan Data				■	■												
5.	Analisis Hasil Penelitian					■	■	■										
6.	Penyusunan Laporan						■	■	■	■	■	■	■					
7.	Penyerahan Hasil												■	■				
8.	Hasil Sidang																	■

(Sumber: Peneliti, 2023)

3.4 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan penggolongan data berdasarkan kebutuhan, maka akan dibagi sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama dalam konteks penelitian. Data primer bersifat orisinal dan diperoleh secara langsung oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung. Data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan responden atau subjek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, dan peneliti akan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada petugas Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam, pebisnis barang elektronik, dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menetapkan 5 kriteria informan (Henri, 2018) yaitu sebagai berikut:

- a. Berada di daerah yang diteliti: Informan penelitian harus berada atau berlokasi di wilayah yang menjadi fokus penelitian. Ini penting karena informan yang berada di wilayah tersebut memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih langsung tentang situasi atau permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Mengetahui kejadian atau permasalahan: Informan penelitian harus memiliki pengetahuan tentang kejadian atau permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, mereka dapat memberikan wawasan dan informasi yang relevan untuk mendukung analisis penelitian.

- c. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan: Informan yang merasakan dampak dari kejadian atau permasalahan yang diteliti memiliki sudut pandang yang berbeda dan relevan dalam memahami implikasi dan akibat dari peristiwa atau masalah tersebut.
- d. Terlibat langsung dengan permasalahan: Informan yang terlibat secara langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman praktis tentang situasi tersebut. Keterlibatan langsung ini membuat mereka menjadi sumber informasi yang berharga untuk penelitian.

Berdasarkan kriteria informan di atas, maka ditentukan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Kriteria Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Sabaruddin Rahmat Pasaribu	Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan
2.	Elgian Tobing	Pelaksana Bidang Penindakan dan Penyidikan
3.	Alimsyah	Pelaksana Bidang Penindakan dan Penyidikan
4.	Siti Nurhaliza	Pebisnis barang elektronik
5.	Nuning	Pebisnis barang elektronik
6.	Aldo	Masyarakat
7.	Duma	Masyarakat

(Sumber: Peneliti,2023)

2. Data Skunder

Data sekunder adalah sumber data pelengkap berupa data yang telah dikumpulkan. Data ini dapat berupa sumber-sumber publik yang tersedia secara umum, seperti buku, jurnal, laporan pemerintah, data statistik, atau arsip. Data sekunder juga dapat berupa data yang dihasilkan oleh organisasi atau lembaga, seperti data survei, data kesehatan, atau data ekonomi. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur dokumentasi dengan topic struktur organisasi, profil Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam, tupoksi unit yang menangani pengawasan, dokumentasi ruang kerja pegawai, profil pegawai, foto-foto kegiatan pengawasan dan temuan barang elektronik ilegal.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam sebuah penelitian atau studi. Metode pengumpulan data ini dapat beragam tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, sumber data yang tersedia, dan ketersediaan sumber daya. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam. Wawancara dalam penelitian ini bersifat terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan telah

ditentukan sebelumnya, sehingga narasumber sudah mempersiapkan jawaban terlebih dahulu dan proses wawancara menjadi lebih terarah. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara langsung dengan informan penelitian yang merupakan narasumber yang kompeten dan menguasai materi serta pembahasan terkait. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik tanya jawab atau wawancara yang terkontrol, di mana pertanyaan telah disiapkan sebelumnya dan dapat dikembangkan berdasarkan situasi di lapangan. Peneliti aktif dalam menggali informasi tentang pengawasan Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam terhadap peredaran barang elektronik ilegal.

2. Studi dokumentasi

Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen yang relevan dengan data primer, seperti buku, jurnal, laporan, catatan, atau arsip. Struktur birokrasi, sarana dan prasarana yang ada di Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam. Data yang dikumpulkan dari studi dokumentasi dapat digunakan untuk mendukung analisis atau memperoleh informasi historis.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses berkelanjutan yang memerlukan refleksi terus-menerus terhadap data yang dikumpulkan, pertanyaan-pertanyaan analitis, serta pencatatan catatan singkat sepanjang penelitian. Menurut Sugiyono (2019) langkah-langkah analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui berbagai cara, seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau gabungan ketiganya (triangulasi). Data yang dikumpulkan akan sangat bervariasi karena peneliti mencatat semua yang dilihat dan didengar selama penjelajahan awal.

2. Reduksi data

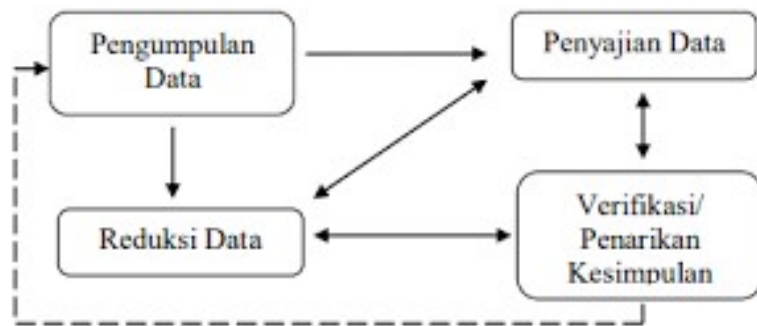
Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah reduksi data, di mana data dipilah-pilah dan dipilih hal-hal yang paling penting dan relevan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah data direduksi. Data dapat disajikan dalam bentuk naratif atau visual seperti bagan, grafik, atau tabel untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan terperinci.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh masih bersifat sementara dan dapat berubah ketika penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data tambahan. Kesimpulan akan diverifikasi berdasarkan bukti-bukti dari data yang selanjutnya dikumpulkan.



(Sumber: Sugiyono, 2019)

Gambar 3.1 Metode Analisis Data

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data (validitas) dalam penelitian kualitatif mengacu pada sejauh mana data yang diperoleh merupakan representasi yang tepat dan akurat dari fenomena atau objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, Sugiyono menyebutkan beberapa aspek keabsahan data yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. *Credibility* (Validitas Internal)

Validitas internal berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian mencerminkan fenomena yang benar-benar terjadi dalam konteks yang diteliti. Untuk meningkatkan *credibility*, peneliti harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar relevan dengan pertanyaan penelitian. Pengumpulan data yang cermat, triangulasi data (menggunakan beberapa metode pengumpulan data), serta konfirmasi dari partisipan atau informan tentang interpretasi data, dapat meningkatkan validitas internal.

2. *Transferability* (Validitas Eksternal)

Validitas eksternal berfokus pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digeneralisasi pada situasi atau populasi lain di luar konteks penelitian. Untuk meningkatkan transferability, peneliti harus menyajikan konteks penelitian secara mendalam dan jelas, sehingga pembaca dapat memahami situasi yang diteliti dengan baik. Penggunaan deskripsi detail tentang partisipan, latar belakang, dan konteks penelitian juga dapat membantu pembaca untuk memahami kemungkinan transferabilitas hasil penelitian.

3. *Dependability* (Reabilitas)

Reabilitas berkaitan dengan sejauh mana penelitian ini dapat diandalkan dan diulang untuk menghasilkan hasil yang konsisten. Dalam penelitian kualitatif, dependability dapat ditingkatkan melalui penggunaan triangulasi metodologi dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan.

4. *Confirmability* (Obyektivitas)

Confirmability berfokus pada sejauh mana hasil penelitian dapat dianggap obyektif, artinya tidak dipengaruhi oleh pandangan atau kecenderungan peneliti. Untuk memastikan confirmability, peneliti harus mendokumentasikan dengan baik proses penelitian, langkah-langkah analisis, serta refleksi peneliti dalam catatan penelitian atau jurnal penelitian.